



Proceeding of  
**Accounting Responsibility 2022**

Website. :

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/par>

© LPPM Universitas Pamulang

JL.Surya Kencana No.1 Pamulang,

Tangerang Selatan – Banten

Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491

Email : [parmaks@gmail.com](mailto:parmaks@gmail.com)

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan DKI Jakarta Sebelum Sesudah Pandemi Periode 2019 Dan 2020

Ahmad Bisri<sup>1)</sup>, Nita Laila Asyifa<sup>2)</sup>, Novel Azhari<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>[abisri8910@gmail.com](mailto:abisri8910@gmail.com), <sup>2)</sup>[nit.asyifa19@gmail.com](mailto:nit.asyifa19@gmail.com), <sup>3)</sup>[novelaza1919@gmail.com](mailto:novelaza1919@gmail.com)

Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Pamulang

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan pada masa Pandemi Covid-19 Pemerintahan DKI Jakarta. Periode Desember 2019 Februari 2020 yang merupakan periode dimana Covid-19 sudah muncul namun belum resmi diumumkan di Indonesia, Periode Kedua saat Maret 2020 Mei 2020 saat Pandemi resmi diumumkan dan berlaku pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan periode Juni 2020-Desember 2020 saat PSBB telah dilonggarkan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan daerah pemerintah DKI Jakarta pada masa saat Covid-19 dibandingkan sebelum Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan pada masa pandemic dengan diukur melalui (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dianggap tinggi yang termasuk dalam pola delegatif (2) Rasio Efektifitas PAD hasilnya cukup Efektif yang artinya penerimaan PAD sesuai dengan target penerimaan PAD (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dinyatakan tidak efisien sehingga pemerintah Jakarta dikarenakan besarnya belanja daerah pada masa pandemi. (4) Rasio Pertumbuhan secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan sehingga membuat kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Jakarta.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, DKI Jakarta

### Abstract

This study aims to measure financial performance during the Covid-19 Pandemic of the DKI Jakarta Government. The period December 2019 February 2020 which is the period where Covid-19 has appeared but has not been officially announced in Indonesia, the Second Period during March 2020 May 2020 when the Pandemic was officially announced and the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) were in effect, and the June period 2020-December 2020 when PSBB has been relaxed. In addition, this study aims to determine whether there are differences in the regional financial performance of the DKI Jakarta government during the Covid-19 period compared to before Covid-19. The method used in this research is

*descriptive qualitative research method. The results of this study show that financial performance during the pandemic is measured by (1) Regional Financial Independence Ratio is considered high which is included in the delegative pattern (2) PAD Effectiveness Ratio is quite Effective, which means PAD revenue is in accordance with PAD revenue targets (3) Financial Efficiency Ratio Regions are declared inefficient so that the Jakarta government is due to the large regional spending during the pandemic. (4) The overall Growth Ratio experienced a significant decline, resulting in less than the maximum amount of income received by Jakarta.*

**Keyword** : *Regional Financial Performance, Financial Ratio, DKI Jakarta*

## PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 memberikan implikasi luas bagi masyarakat di seluruh wilayah yang terjangkit termasuk di Indonesia. Dengan munculnya Covid-19 pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat di himbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah untuk menghindari meningkatnya penyebaran Covid-19. Berbeda dengan negara lain yang menerapkan karantina, pemerintah Indonesia diharapkan dapat memitigasi dampak krisis ekonomi melalui kebijakan social distancing dan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar (Nasution, 2020; Kickbusch, 2020). Namun kebijakan ini berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan membatasi jangkauan pergerakan masyarakat, belum lagi jumlah karyawan yang di PHK atau bahkan perlu di PHK. Salah satu alasan untuk mengkompensasi lubang perakitan. (Honoatubun, 2020).

Selain itu, Damuri dan Hirawan (2020) menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 dapat dilihat dari dua perspektif ekonomi yang berbeda: supply dan demand. Di sisi permintaan, pandemi Covid-19 jelas akan membatasi konsumsi, aktivitas perjalanan dan transportasi, meningkatkan biaya transportasi dan perdagangan. Sementara itu, dari sisi penawaran, kemungkinan akan terjadi penurunan produktivitas tenaga kerja/pekerja, penurunan aktivitas investasi dan keuangan, serta gangguan pada rantai nilai global. Di sisi konsumen, penyebaran Covid-19 otomatis akan mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak melakukan aktivitas perjalanan atau pariwisata, melainkan meningkatkan konsumsi kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi cenderung menurun akibat distorsi harga akibat melonjaknya biaya transportasi dan logistik. Di sisi lain, dari sisi manufaktur, beberapa sektor utama di Indonesia juga terkena dampak wabah Covid-19, terutama manufaktur (manufaktur). Kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian Indonesia sangat penting (19-20%), dan produk dari industri manufaktur juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total ekspor Indonesia, melebihi 70%. Kinerja manufaktur Indonesia diperkirakan akan melambat seiring dengan meningkatnya jumlah kasus Covid-19.

DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya cenderung meningkat setiap tahunnya, dengan besarnya PAD yang diterima diharapkan DKI Jakarta dapat membiayai sendiri program-program daerahnya sehingga DKI Jakarta tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat dalam urusan pemerintah daerahnya. Data PAD DKI Jakarta selama lima tahun terakhir tersaji sebagai berikut:

**Tabel 1 Laporan Anggaran dan Realisasi PAD Perode 2016-2017**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		%
	Anggaran	Realisasi	
2016	38.501.784.839.738	36.888.017.587.716	95,81
2017	41.687.387.826.535	43.901.488.807.743	105,31
2018	44.350.077.858.844	43.327.136.602.811	97,89
2019	50.845.081.891.466	45.707.400.003.802	89,90
2020	38.085.985.616.631	37.414.754.711.193	98,24

Sumber: PPID DKI Jakarta

Berdasarkan data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta, pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memenuhi target dengan prosentase pencapaian sebesar 95,81%, tahun 2017 realisasi PAD melampaui target dengan prosentase sebesar 105,31%, sedangkan pada tahun 2018-2020 realisasi PAD belum memenuhi target dengan prosentasi pencapaian sebesar 97,89%, 89,90%, dan 98,24%. Besarnya PAD yang diterima DKI Jakarta seharusnya dapat membiayai program-program daerahnya, akan tetapi masih banyak program-program DKI Jakarta yang belum terealisasi. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya serapan belanja daerah DKI Jakarta selama lima tahun terakhir.

Realisasi belanja daerah 88,40% pada tahun 2020 disebabkan antara lain karena waktu. Kegiatan akibat perubahan APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan pada 11 Desember 2020, batas waktu proses pengadaan barang dan jasa, harga di atas batas anggaran, belum ada putusan pengadilan, pembatasan kegiatan karena pandemi, daerah Hambatan teknis lainnya seperti seperti revisi regulasi, pembatasan lekukan dalam pengadaan suku cadang (Cindar Hari Prabowo, 2020).

Menurut data *Jakarta.bpk.go.id* (April 2021), ada beberapa penyebab belum optimalnya pendapatan dari komponen pajak, terutama penurunan kemampuan ekonomi wajib pajak (WP). WP dengan Nilai Takdir yang tinggi akibat pandemi Covid-19 sehingga sulit untuk memenuhi pembayaran PBB-P2. Akibatnya, banyak Kena Pajak yang memiliki SKP besar yang sulit dipungut karena status Kena Pajaknya belum diperbarui menjadi padam, disengketakan, milik pemerintah, atau dikuasai pemilik. Alasan lainnya adalah pandemi Covid-19 dan kecenderungan yang terus berlanjut untuk menggunakan harga NJOP (bukan harga transaksi aktual) dalam transaksi di DKI Jakarta, yang menghambat upaya penagihan agresif kami secara optimal. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pada kinerja pemerintahan DKI Jakarta Tahun 2019 dan 2020 pada dampak pandemic Covid 19.

## LANDASAN TEORITIS

### Grand Theory

#### Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Teori utama yang mendasari penelitian ini adalah teori *stewardship*, yang menggambarkan situasi di mana manajemen berfokus pada tujuan hasil utama untuk kepentingan organisasi, daripada dimotivasi oleh tujuan individu. Menurut Donaldson dan Davis (1991) dalam Anton (2010), *stewardship* menyatakan bahwa tidak ada situasi di mana manajer dimotivasi oleh tujuan individu, melainkan terfokus pada tujuan utama, yaitu kepentingan organisasi menjadi jelas. *Stewardship theory* juga merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana manajer tidak dimotivasi oleh tujuan individu, tetapi terfokus pada tujuan hasil utama untuk kepentingan organisasi. telah mengembangkan landasan psikologis dan sosiologis di mana pemimpin bertindak sebagai pelayan untuk mencapai organisasi tujuan (Sanjaya, 2017).

Teori ini mengasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan keberhasilan perusahaan. Keberhasilan organisasi mencerminkan memaksimalkan

kepentingan klien dan kelompok manajemen. Memaksimalkan utilitas kelompok ini pada akhirnya memaksimalkan manfaat individu dalam kelompok organisasi. Teori *Stewardship* dapat diterapkan pada studi akuntansi organisasi sektor publik seperti instansi pemerintah (David, 2006 dan Thorton, 2009) dan organisasi nirlaba lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010). Pada awal perkembangannya, akuntan publik siap untuk menutupi informasi yang diperlukan untuk hubungan antara manajer dan klien. Akuntansi sebagai mesin perdagangan bergerak ke arah yang semakin kompleks, diikuti dengan profesionalisasi akuntansi dan pengembangan organisasi sektor publik.

Sebagai lembaga pemerintahan daerah yang dipercaya untuk bertindak demi kepentingan umum dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab secara finansial untuk pencapaian tujuan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan umum yang optimal. Auditor internal dapat menggunakan seluruh keterampilan dan keahliannya untuk mengefektifkan pengendalian internal dan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas (Dian Indira, 2017).

### **Pengertian Laporan Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Laporan keuangan adalah bagian dari proses akuntansi dan laporan keuangan yang lengkap biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, neraca, catatan, dan laporan keuangan lainnya materi penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, lampiran informasi tambahan lainnya yang terkait dengan laporan. (IAI, 2002). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala hak dan kewajiban uang dan barang yang bisa dijadikan aset daerah kecuali dimiliki/dikuasai oleh negara atau wilayah yang lebih tinggi; dan pihak lain yang tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku (Abdul Halim, 2007).

### **Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Meningkatnya permintaan untuk praktik akuntabilitas publik berarti bahwa manajer sektor publik memberikan informasi kepada publik. Secara khusus tujuan laporan keuangan yang menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan SK No. 71 Tahun 2010 adalah untuk: (a) memberikan informasi tentang status sumber daya ekonomi, utang dan modal pemerintah; (b) memberikan informasi tentang perubahan posisi sumber daya ekonomi, utang dan modal negara; (c) memberikan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; (d) memberikan informasi tentang pemenuhan pelaksanaan anggaran; (e) memberikan informasi tentang bagaimana entitas pelapor akan mendanai operasinya dan memenuhi kebutuhan likuiditasnya; (f) informasi tentang potensi pemerintah untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintah; (g) memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi kemampuan entitas pelapor untuk membiayai operasinya.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kuantitas dan kualitas terukur dari kegiatan atau program yang dicapai atau dicapai dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran daerah, kinerja atau hasil. Kapasitas wilayah dapat diukur dengan mengevaluasi efektivitas pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat. (Sumaryo, 2010). Organisasi sektor publik di bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan dan keselamatan, penegakan hukum, dan transportasi yang bertujuan untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat jika memungkinkan. Pengukuran kinerja fiskal pemerintah daerah dilakukan untuk mencapai tiga tujuan: 1) meningkatkan kinerja pemerintah daerah, 2) mengalokasikan sumber daya dan mendukung pengambilan keputusan, dan 3) melaksanakan akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan. (Mardiasmo, 2002:121).

Menurut Irham Fahmi (2011, 2), kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan telah menerapkan penerapan aturan kinerja keuangan secara memadai dan akurat. Kinerja perusahaan adalah deskripsi posisi keuangan perusahaan yang dianalisis menggunakan alat analisis keuangan untuk memberi

Anda gambaran tentang seberapa baik atau buruk posisi keuangan perusahaan mencerminkan kinerja pekerjaannya selama periode waktu tertentu. Hal ini sangat penting untuk pemanfaatan sumber daya yang optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Sistem pengukuran kinerja membantu manajer memantau pelaksanaan strategi organisasi dengan membandingkan hasil aktual (keluaran) dengan tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata lain, pengukuran kinerja adalah cara mengevaluasi kemajuan terhadap tujuan yang ditetapkan. Sistem pengukuran kinerja yang baik juga membantu staf menunjukkan kepada publik dan pembuat kebijakan bahwa layanan publik diberikan dengan baik, yang pada akhirnya membangun kepercayaan publik.

**Definisi Operasional Variabel Penelitian**  
**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat IPKD) adalah satuan ukuran yang ditentukan oleh seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah yang objektif, transparan, dan akuntabel. Pertanyaannya adalah 1). Konsistensi dokumen perencanaan dan anggaran. 2). Alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3). Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4). pemasukan anggaran; 5). Situasi keuangan daerah; 6). Opini Kantor Pemeriksa Keuangan (LKPD) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Beberapa metrik yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan APBD antara lain: Tingkat kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan (Abdul Halim, 2012, L-5)

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2020, kemandirian finansial adalah kondisi bahwa pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber dana di luar kendalinya atau pengaruh dari sumber dalam dan luar negeri. Kemandirian daerah dapat diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan kotor, rasio pendapatan transfer daerah terhadap pendapatan kotor, dan rasio kemandirian daerah, yaitu rasio pendapatan asli daerah (PAD). Pada pendapatan yang ditransfer daerah dan utang daerah. Rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

2) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan dibandingkan target yang sudah ditetapkan berdasarkan fakta potensi daerah. ( Abdul Halim, 2012, L6.)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}} \times 100$$



Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahsun (2009), adalah:

- 1) Jika yang diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) maka tidak efektif
- 2) Jika yang diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) maka efektifitas berimbang
- 3) Jika yang diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) maka efektif

b. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi suatu ukuran yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Maka dapat dihitung dengan rumus :

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Biaya\ yang\ Dikeluarkan\ untuk\ Memungut\ PAD}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD} \dots\dots\dots(3)$$

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presentasi Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2007)

3) Rasio Aktivitas

Tingkat aktivitas menunjukkan bagaimana pemerintah negara bagian memprioritaskan dananya untuk biaya operasional dan investasi. Tidak ada standar yang jelas mengenai rasio ideal belanja operasional dan belanja modal terhadap belanja daerah, karena sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan pembangunan dan tingkat investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan.

Rasio Aktivitas terdiri dari:

a. Rasio belanja operasi terhadap APBD

$$\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

b. Rasio belanja modal terhadap APBD

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

4) Rasio Pertumbuhan

Tingkat pertumbuhan adalah rasio yang mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Pengetahuan tentang pertumbuhan untuk menilai potensi perhatian. Laju pertumbuhan dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$Rasio\ Pertumbuhan\ PAD = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD\ X_n - X_{n-1}}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD\ X_{n-1}} \times 100\% \dots\dots\dots$$

**Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan informasi tentang metode penelitian, dan pembahasannya memberikan dasar untuk perbandingan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama&Tahun	Judul	Hasil
1	Cindar Hari Prabowo, 2021	Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Provonsi DKI Jakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta sudah baik berdasarkan rasio pengukuran kinerja keuangan. berarti Pemprov DKI Jakarta lebih mementingkan belanja operasi daripada belanja modal, adapun rasio pertumbuhan dari tahun anggaran 2008 – 2012 mengalami kenaikan yang beragam
2	Arni Karina dan Dephy Noerainy (2016)	Kinerja Jakarta Islamic Index Dimasapandemi Covid-19 Tahun 2020	Penelitian ini memberikan temuan bahwa pandemi covid-19 menyebabkan ketidakpastian diawal-awal terjadi infeksi global dan return harian saham-saham syariah mengalami pertumbuhan yang negatif sepanjang periode PSBB.
3	Erawati, (2009)	Analisis Kinerja Keuangan Kawasan SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) Tahun Anggaran 2007- 2008	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kawasan Sarbagita relatif meningkat.</li> <li>2. Tingkat efektivitas keuangan Kawasan Metropolitan Sarbagita semuanya di atas 100 persen (sangat efektif).</li> <li>3. Rata-rata tingkat efisiensi Kawasan Metropolitan Sarbagita kurang efisien, bahkan ada yang tidak efisien.</li> </ol> <p>Tingkat keserasian belanja daerah Kawasan Metropolitan Sarbagita cukup baik dengan rata-rata 40 persen.</p>
4	Wahid Wachyu Adi Winarto, 2022	Analisis Komparasi Kinerja Saham Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks Sebelum Dan Selama Pandemi Covid 19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio risk adjusted return, sharpe, treynor dan Jensen alpha tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara sebelum dan selama pandemic Covid 19.

Kerangka berpikir tentang analisis kinerja keuangan sebelum dan setelah pandemic Covid-19 pada pemerintahan DKI Jakarta, seperti yang tampak pada gambar dibawah ini:



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

**Proposisi Penelitian**

Berdasarkan kerangka di atas, maka usulan dalam penelitian ini adalah dana daerah yang bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Keuangan daerah berkaitan dengan pelaksanaan laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat mempertanggungjawabkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk menemukan gambaran, situasi dan objek dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta. Menurut Muttar (2013,10) Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori penelitian pada suatu titik waktu tertentu. Melalui metode ini, penulis ingin mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat efektifitas, tingkat efisiensi, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan pemerintah DKI Jakarta sebelum dan sesudah masa pandemi.

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif maka instrumen penelitian yang kami gunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020 Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Unit analisis yang digunakan oleh peneliti adalah berupa:

- 1) Unit analisis Wilayah, yaitu penelitian yang dilakukan pada wilayah DKI Jakarta
- 2) Unit analisis Waktu, yaitu penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 (sebelum covid) dan tahun 2020 (setelah covid)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**

1) Rasio Kemandirian

	2019		2020	
Rasio Kemandirian =	$\frac{66.233.633.470.753}{83.819.992.150.676}$	$\times 100$	$= \frac{57.385.937.786.620}{75.420.120.604.345}$	$\times 100$
	<b>79,02%</b>		<b>76,09%</b>	



Berdasarkan Rasio Kemandirian tahun 2020 dan tahun 2019 Tingkat Kemampuan Daerah dikatakan **Tinggi** dengan Pola Hubungan **Delegatif**, karena kemandirian berada diantara 75-100 yang artinya campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektivitas

	2019		2020	
Rasio Efektivitas =	$\frac{45.707.400.003.802}{50.845.081.891.466}$	x 100	=	$\frac{37.414.754.711.193}{38.085.985.616.631}$ x 100
	<b>89,90%</b>			<b>98,24%</b>

Tingkat Efektivitas pada tahun 2020 mengalami kenaikan dan perubahan dibanding tahun sebelumnya yaitu 2019 dari **Cukup Efektif menjadi Efektif**.

b. Rasio Efisiensi

	2019		2020	
Rasio Efisiensi =	$\frac{64.099.287.469.013}{62.300.679.833.068}$	x 100	=	$\frac{51.716.860.929.662}{55.887.004.237.727}$ x 100
	<b>102,89%</b>			<b>92,54%</b>

Berdasarkan rasio diatas, diketahui bahwa rasio efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2019 termasuk tidak efisien karena efisiensi keuangan daerah berada di atas 100% dan pada tahun 2020 mengalami perubahan menjadi kurang efisien karena berada pada batasan diatas 90 sampai dengan 100% hal tersebut disebabkan adanya belanja modal yang cukup tinggi di tahun 2019.

3) Rasio Aktivitas

a. Ratio Belanja Operasi terhadap APBD

Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	x 100
Tahun 2019 :		
52.545.745.724.373	64.099.287.469.013	
		<b>82%</b>
Tahun 2020 :		
43.835.699.863.256	51.716.860.929.662	
		<b>85%</b>

b. Rasio Belanja Modal pada APBD

Total Belanja Modal	x 100
Total Belanja Daerah	
Tahun 2019 :	
11.551.927.779.590	
64.099.287.469.013	
	18%
Tahun 2020 :	
3.173.223.520.882	
51.716.860.929.662	
	6%

Dari perhitungan ratio aktivitas diatas, terlihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja operasi dimana rasio belanja operasi tahun 2019 sebesar 82% dan tahun 2020 sebesar 85%, sedangkan ratio belanja modal masih rendah tahun 2019 sebesar 18% dan tahun 2020 sebesar 6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ratio aktivitas, pemerintah DKI Jakarta lebih memprioritaskan belanjanya padahal belanja operasi dari pada belanja modal.

4) Rasio Pertumbuhan

Tahun 2019 :	
2.380.263.400.991	
43.327.136.602.811	
	5%
Tahun 2020 :	
- 8.292.645.292.609	
45.707.400.003.802	
	-18%

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Asli Daerah padahal tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019, hal ini disebabkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah menurun. Pajak Daerah dan retribusi daerah menurun karena rumah makan banyak yang tutup sebagainya. Padahal pengeluaran belanja modal dan belanja terjadi penurunan. Terutama pada belanja modal yang sangat signifikan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Kinerja keuangan dalam hal tingkat kemandirian adalah 75-100%, yang juga merupakan pola pendelegasian, dan DKI Jakarta benar-benar kompeten dan mandiri, sehingga tidak ada lagi intervensi pemerintah pusat. Kinerja keuangan dibuktikan dengan tingkat efektif pada tahun 2020 mengalami peningkatan/perubahan dari “cukup efektif” menjadi “efektif” dibandingkan tahun 2019. Artinya penerimaan PAD sudah sesuai dengan target penerimaan PAD. Rata-rata kinerja keuangan yang dihasilkan dari rasio efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah pemerintah DKI Jakarta adalah 102% yang berarti lebih

dari (>100%) dan dinyatakan tidak efisien. Kinerja keuangan dilihat dari tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata, yaitu -18%. Artinya, pertumbuhan Pemprov DKI Jakarta masih kecil. Hal ini dikarenakan kondisi Covid-19.

### Saran

1. Pemerintah DKI Jakarta mampu meningkatkan kemandirian dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang dapat meningkatkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) wilayah dari DKI Jakarta.
2. Untuk penyelidikan lebih lanjut, diharapkan masih ada waktu yang lama untuk menganalisis kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta secara lebih rinci. Perluas ruang lingkup kajian untuk dapat membandingkan dengan kinerja pemerintah provinsi lain.

### DAFTAR PUSTAKA

Adhiantoko, Hony. 2013, Skripsi. Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta.

Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Jakarta. Erlangga.

Halim, Abdul dan Syam Kusufi, M, 2012, Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, edisi pertama jilid 1, Jakarta, Salemba Empat.

<https://jakarta.bpk.go.id/dampak-pandemi-terhadap-pendapatan-dki-tidak-signifikan/>

<https://ppid.jakartal.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah>

<https://www.kominfo.go.id>

Kickbusch, I., Leung, G. M., Bhutta, Z. Al., Matsoso, M. P., Ihekweazu, C., & Abbasi, K. (2020). Covid-19: How the Virus is Turning The World Upside Down. *Bmj*, 1336(April), m1336. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1336>

Kirigia, J. M., & Muthuri, R. N. D. K. (2020). The Fiscal Value of Human Lives Lost From Coronavirus Disease (COVID-19) in China. *BMC Research Notes*, 13(1), 1–5. <https://doi.org/10.1186/s13104-020-05044-y>

Sipa, Hanoatubun. 2020, Dampak Covid19 Terhadap Perekonomian Indonesia, Universitas Kristen Satya Wacana